



**Tabayyun : Journal Of Islamic Studies**

Vol. 3 No. 1, 2025, E-ISSN : 3046-5729

# **Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

**Syacharani Aulia Fachri<sup>1</sup>, Sonya Noprisa Sumantri<sup>2</sup>, Febri Adelia Ningsih<sup>3</sup>, Shafiyah Sabrina<sup>4</sup>, Ahmad Sukry Daulay<sup>5</sup>, Rahayu Pratiwi,<sup>6</sup>**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia<sup>12345</sup>,

Nalanda International University, India<sup>6</sup>

Email: syacharani0203222135@uinsu.ac.id<sup>1</sup>,

sonya0203222116@uinsu.ac.id<sup>2</sup>, febri0203222103@uinsu.ac.id<sup>3</sup>,

shafiyah0203222112@uinsu.ac.id<sup>4</sup>, sukry0203222149@uinsu.ac.id<sup>5</sup>,

rahayu.secs23@nalandaunive.edu.in

**Abstract:** Islam does not have a complete and pre-existing political or governmental system, including discussions about political dynasties. The phenomenon of political dynasties occurred in the history of Islam, as well as in Indonesia, during the reformera, its scope expanded from regional to national levels. Indeed, there is no policy that prohibits political dynasties in Indonesia from implementing it, but if this situation continues, it can threaten the existence of the Indonesian government and damage the essence of democracy. This study aims to explain how the practice of political dynasties existed in Indonesia during the reformera and explain how contemporary Islamic jurisprudence views, in this case using the ideology of Muhammad Abid Al-Jabiri's political essay, the practice of political dynasties in Indonesia. The research method used in this study is library research, using normative, historical, and sociological approaches. The analysis technique of this study uses content analysis. The results of this study indicate that the practice of political dynasties in Indonesia raises many different problems, ranging from politics to economics. The development of political dynasties in Indonesia is also influenced by several factors, including the absence of policies that prohibit political dynasty activities, and others. In the practice of political dynasties in Indonesia, faith is interpreted as political ideology, ethnicity as nepotism and ghanimah as economic interests, whether the economic interests of the political dynasty or others.

**Keywords:** Dynasty, Politics, Fiqh Siyasah, Democracy

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi dalam menerapkan sistem hukum ketatanegaraan, dimana pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>1</sup>

Pergantian kepemimpinan politik di negara demokrasi dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu kegiatan demokrasi yang diselenggarakan sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat dan dianggap sebagai kesempatan bagi rakyat sebagai pemilih untuk menilai calon pemimpinnya. Warga negara berperan sebagai penjaga gerbang, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam memilih pemimpin. Dalam sistem negara demokrasi, pemegang kekuasaan menggunakan banyak cara untuk mempertahankan kekuasaan, salah satunya adalah praktik politik dinasti.

Kajian terdahulu sudah membahas bagaimana politik dinasti dapat dipahami sebagai reproduksi kekuasaan yang mengandalkan darah dan kekerabatan untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan. Politik dinasti merupakan fenomena luas yang muncul di sejumlah negara modern. Di Indonesia, fenomena politik Dinasti dapat dikatakan terus berkembang, baik dari segi jabatan politik di lembaga legislatif seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau dalam pengurus kedudukannya sebagai kepala daerah. Politik dinasti sudah mapan di tingkat lokal dan nasional.<sup>2</sup>

Negara demokratis harus seterbuka mungkin dalam urusan politik, memberikan kesempatan kepada warganya untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.<sup>3</sup> Namun kenyataannya dengan munculnya politik dinasti hal ini membatasi partisipasi masyarakat karena perbedaan status sosial dan hak dengan kekuasaan yang berkuasa. Politik dinasti memunculkan pragmatisme politik dengan cara mendorong keluarga

---

<sup>1</sup> Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan Berada Ditangan Rakyat dan Dilaksanakan Menurut Undang-Undang Dasar

<sup>2</sup> Titin Purwaningsih, "Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan", Jurnal Politik Volume 1, No Edisi 1, hlm.98

<sup>3</sup> Mega Lestari, "Dinasti dalam Perspektif Demokrasi", Artikel Ilmiah (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020). H. 5

atau kerabat penguasa menjadi pejabat dan membuat rakyat tidak mungkin berpartisipasi aktif dalam proses politik demi mendapatkan status dan kekuasaan. Masyarakatnya terhambat oleh adanya pemerintahan dinasti prakteknya.<sup>4</sup>

Sifat dan kekuatan politik dalam Islam sedemikian rupa sehingga kepercayaan harus diberikan kepada orang-orang yang benar-benar ahli, mampu kapasitas, berkualitas, bertanggung jawab, adil, jujur dan beretika untuk mampu memimpin umat menuju bangsa yang lebih baik, harmonis, dinamisme, kemakmuran dan kehidupan damai.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa politik dan kekuasaan sering kali ditentukan oleh kemudahan akses terhadap fasilitas, ketenaran, kekayaan, bahkan perempuan, yang berdampak pada banyak orang yang menginginkannya. Perebutan kekuasaan tidak bisa dihindari dalam perebutan jabatan, Oleh karena itu, tidak jarang terjadi permainan politik antar calon dengan menggunakan berbagai cara, teknik dan strategi strategi yang berbeda-beda untuk bisa meraih kekuasaan. Berdasarkan persepsi tersebut, tidak mengherankan jika begitu berkuasa, kepentingannya menjadi prioritas utama yang harus dipenuhi. Sementara kepentingan masyarakat tidak hanya terabaikan, namun seringkali dikorbankan jika bertentangan dengan kepentingan penguasa. Inilah sebabnya mengapa Islam tidak menerima gagasan Vilfredo Pareto, seorang ilmuwan politik asal Italia yang mengatakan bahwa politik dan kekuasaan hanyalah soal siapa yang berkuasa.

Politik dinasti cukup problematis karena tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Selain itu, praktik politik dinasti juga diyakini dapat menciptakan peluang lahirnya penguasa yang berkualitas dan memfasilitasi munculnya otokrasi dalam berbagai bentuk. Memang dalam sistem politik dinasti, keintiman personal membawa kekuasaan lebih besar, hingga menumbangkan sistem demokrasi yang ingin dicapai.

Selain itu, kebijakan Dinasti dinilai telah merampas demokrasi dan menjadikan demokrasi sendiri sulit dicapai. Praktek politik dinasti diungkapkan oleh salah satu ulama yaitu Agustino bahwa politik dinasti akan berdampak buruk terhadap pembangunan sosial, politik dan ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi yang dimiliki setiap warga negara yang berjumlah akan dibatasi karena didominasi oleh penguasa, keluarganya dan kerabatnya.

---

<sup>4</sup> Djoni Gunanto, “*Tinjauan Kritis Politik dalam Perspektif Demokrasi*”, SAWALA Jurnal Administrasi Negara 8, No 2, 2020.h.178

Kajian tentang dinasti politik ini telah ada beberapa penelitian yang membahasnya. Di antaranya adalah tulisan Martien Herna Susanti tentang dinasti politik dalam pilkada di Indonesia. Dalam kesimpulannya ia mengemukakan bahwa dinasti politik cenderung untuk menguatkan praktik korupsi dikarenakan hasil dalam pilkada yang tidak berlangsung dengan adil dan jujur karena pemimpin petahana cenderung membantu kerabatnya yang menjadi calon kepala daerah.<sup>5</sup> Tulisan Nur Hidayati tentang dinasti politik dan demokrasi Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa dinasti politik dapat merusak system demokrasi termasuk yang terjadi di Indonesia.<sup>6</sup> Tulisan Winda Roselin Effendi tentang dinasti politik dalam pemerintahan lokal yang mengambil kasus kota Banten. . Ia menyimpulkan bahwa elit politik lokal juga dapat membentuk dan mempertahankan dinasti politik sehingga kekuasaan tetap langgeng pada keluarga tertentu saja.<sup>7</sup> Dari kajian literatur di atas, tidak ada yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang menjadi fokus di dalam penelitian ini.

Kajian ini memiliki tujuan untuk membedah dan mencari lebih dalam bagaimana sistem dinasti politik berkembang di Indonesia dan ditinjau dalam perspektif fiqh siyasah. Apakah dinasti politik tersebut adalah sesuatu yang sesuai dengan konsep Islam atau bertentangan dengan berbagai alasan yang dikemukakan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

## Metode

Metode penelitian menggunakan sumber pustaka atau *library research* merupakan pendekatan yang penting dalam mengumpulkan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pendekatan ini melibatkan pencarian, analisis, dan interpretasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dipelajari.<sup>8</sup>

Langkah pertama dalam metode ini adalah merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang jelas dan terfokus. Setelah itu,

---

<sup>5</sup> Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (30 Oktober 2017): 111–19, <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.

<sup>6</sup> Nur Hidayati, "DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA," *Orbit: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (1 Maret 2014), <https://doi.org/10.32497/orbit.v10i1.357>.

<sup>7</sup> Winda Roselina Effendi, "DINASTI POLITIK DALAM PEMERINTAHAN LOKAL STUDI KASUS DINASTI KOTA BANTEN," *JURNAL TRIAS POLITIKA* 2, no. 2 (16 Oktober 2018): 233–47, <https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1471>.

<sup>8</sup> Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. *The craft of research* (3rd ed.). (University of Chicago Press 2008).

peneliti melakukan pencarian terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik tersebut.

Pencarian ini dapat dilakukan melalui berbagai platform pustaka digital maupun fisik, seperti perpustakaan universitas, database online (seperti *JSTOR*, *Google Scholar*, dan *ProQuest*), serta katalog perpustakaan nasional atau internasional.<sup>9</sup> Setelah sumber-sumber relevan berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap informasi yang ditemukan. Peneliti perlu mengidentifikasi pola, perbedaan, dan kesamaan dalam berbagai sudut pandang yang terdapat dalam literatur yang telah dipilih.

Terakhir, hasil analisis literatur tersebut digunakan untuk mendukung argumen dalam penulisan karya ilmiah, seperti makalah, laporan penelitian, atau tesis. Peneliti perlu memastikan bahwa semua informasi yang digunakan diacu dengan benar sesuai dengan gaya penulisan referensi yang diakui (misalnya *APA*, *MLA*, atau *Chicago*). Metode penelitian ini memiliki kelebihan dalam memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai perspektif dan hasil penelitian sebelumnya secara komprehensif, serta memberikan dasar yang kuat untuk membangun pengetahuan baru atau menyempurnakan pemahaman terhadap topik yang diteliti.<sup>10</sup>

## Hasil Penelitian

### A. Pengertian Dinasti Politik

Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan terbaik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat karena memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berbicara.<sup>11</sup> Menurut Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Indonesia belum mencapai demokrasi substansial. Saat ini, negara masih berada pada fase demokrasi prosedural, menurut IDI (Indeks Demokrasi Indonesia).

Demokrasi adalah cara pemerintahan. Namun, saat ini demokrasi dianggap lebih luas sebagai sistem pemerintahan atau

---

<sup>9</sup> Creswell, J. W. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). (Sage Publications 2014).

<sup>10</sup> Hart, C. *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. (Sage Publications 2001).

<sup>11</sup> Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2014), hlm 15

politik. Dalam sistem demokrasi, konsep dinasti politik sebenarnya tidak ada karena konstitusi kita memberikan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Negara ini dimiliki oleh semua warganya, sehingga tidak benar jika kehidupan politik didominasi oleh satu keluarga atau dinasti dalam nama demokrasi dan konstitusi. Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak untuk menjabat di posisi politik selama ia terpilih dan dipercayai oleh rakyat.<sup>12</sup> Biasanya, pengawasan dan pembatasan politik dinasti hanya mengacu pada aturan etika terkait perilaku yang sesuai dan sopan. Namun politik dinasti masih terus berkembang di Indonesia, yang lebih menekankan kedekatan personal daripada kemampuan, dan bisa merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun. Dinasti politik di Indonesia dianggap sebagai ancaman. Selain menghambat lahirnya pemimpin yang berkualitas, politik dinasti juga dapat menciptakan tirani dalam bentuk yang berbeda. "Politik dinasti tidak hanya berdampak negatif secara politik, tetapi juga dapat merugikan persaingan usaha yang sehat secara ekonomi. Buktinya, setiap pemerintahan cenderung melibatkan orang-orang dekat dalam mendukung kebijakan ekonominya, dan ini terjadi di banyak negara termasuk Indonesia."

Dinasti politik adalah kekuasaan politik yang dipegang oleh sekelompok orang yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan satu sama lain. Mereka menguasai atau memegang jabatan di berbagai lini pemerintahan, termasuk di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dinasti politik adalah cara strategis untuk menjaga kekuasaan politik dalam sebuah keluarga.<sup>13</sup> Selain itu, dinasti politik bisa memudahkan penguasa mengendalikan hal-hal penting dengan menempatkan keluarganya di posisi strategis.

Dinasti politik adalah pemerintahan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terkait oleh hubungan keluarga. Contohnya, ketika seorang ayah mewariskan kekuasaannya kepada anaknya. Sistem ini umum digunakan oleh negara yang menganut sistem monarki. Dinasti politik berarti kekuasaan hanya boleh dipegang oleh satu keluarga saja. Kekuasaan dinasti politik menyebabkan orang yang tidak berkompeten mendapatkan kekuasaan, sementara orang kompeten tidak dipilih karena bukan anggota keluarga. Selain itu, cita-cita kenegaraan tidak tercapai karena pemimpin atau pejabat negara tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya.

---

<sup>12</sup> Ni'matul Huda, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), hlm.16

<sup>13</sup> Effendi, W.R, *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti*. (Kota Banten: Jurnal Trias Politika, 2018), hlm. 210

Dalam konteks politik di Tanah Air, politik dinasti dianggap sebagai sebuah tantangan bagi semua pihak di dunia politik karena dapat menyebabkan terbentuknya pemerintahan yang kurang berkualitas. Hal ini bisa terjadi karena citra politik dinasti seringkali mengarah pada usaha untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya dengan mengutamakan kepentingan keluarga sendiri, menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan demi keuntungan pribadi atau golongan tertentu.<sup>14</sup> Menurut Querubin, dinasti politik adalah keluarga di mana anggotanya menjabat dalam kekuasaan politik formal selama beberapa generasi. Mereka cenderung tidak melepaskan kekuasaan dari lingkungan keluarga atau kerabat.

Querubin menjelaskan pandangannya tentang dinasti politik, pada dasarnya hal ini berfokus pada keluarga yang anggotanya memiliki kekuasaan politik resmi selama lebih dari satu generasi. Ini berarti bahwa politik dinasti akan memanfaatkan kekuasaan yang ada agar tetap terhubung dengan keluarga atau sanak saudara.<sup>15</sup>

## **B. Dinasti Politik di Indonesia**

Di Indonesia, dinasti politik didefinisikan sebagai usaha seorang pemimpin, berdasarkan hasil pemilihan umum di tingkat pusat dan daerah untuk menempatkan anggota keluarganya untuk menjadi pengganti atau penerus tampuk kekuasaan dan menjadi pemimpin periode berikutnya, menempatkan kerabatnya dalam posisi strategis dalam pemerintah. Ini menunjukkan bahwa pemerintahan politik memengaruhi lebih sedikit sistem pemerintahan saat ini karena lebih berfokus pada regenerasi kekuasaan untuk mempertahankan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan.

Dinasti politik telah ada sejak lama di negara demokrasi. Itu menimbulkan kekhawatiran bahwa ada ketidaksetaraan dalam pembagian kekuatan politik, yang dapat menunjukkan ketidaksempurnaan dalam interpretasi politik demokratis, yang dikenal sebagai "kekuatan melahirkan kekuatan". Dinasti politik telah muncul banyak pada negara demokrasi kontemporer. Dibandingkan dengan jenis pekerja lainnya, dinasti di Kongres Amerika Serikat lebih umum. Dari 80 persen provinsi di Filipina di mana keluarga politik terlibat dalam pemilihan, 74 persen anggota dewan wakil rakyat terpilih berasal dari keluarga dinasti tersebut, menurut hasil pemilihan paruh waktu tahun

---

<sup>14</sup>Yusdani, Politik Dinasti dalam Persoektif Islam dan Negara.27 Agustsus 2020, diakses pada 12 Desember 2024.

<sup>15</sup> Querubin,P, *Family and Politics: Dynasty Incubency Advantage* , (Philippines: Uapublished Manuscript, 2010), hlm 90

2013. Mengingat kembali kekhawatiran Moskow bahwa setiap kelas menunjukkan kecenderungan untuk menjadi turun, bahkan ketika kondisi politik dapat diakses oleh semua orang, posisi keluarga penguasa akan menawarkan banyak keuntungan.

Dinasti politik Indonesia sudah ada sejak lama, sejak keluarga presiden pertama Indonesia, Soekarno. Keturunan Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, dan Guruh Soekarno adalah politisi. Keluarga Gusdur (KH.Abdurrahman Wahid) menunjukkan dinasti politik, dengan saudara kandung dan anak-anak terjun ke politik. Selain itu, Megawati Soekarnoputri menunjukkan gejala dinasti politik karena keterlibatan aktifnya Puan Maharani dalam perpolitikan Indonesia hingga akhirnya menjadi ketua DPR RI. Keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga melakukannya. Keluarga SBY juga terlibat dalam perpolitikan Indonesia, termasuk Eddie Baskoro, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, dan Agung Budi Santosa.

Dinasti politik terus berkembang hingga saat ini. Pada awalnya, orang percaya bahwa virus demokrasi, yang dianggap oleh masyarakat sebagai dinasti politik, akan hilang dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden karena fakta bahwa dia bukan berasal dari keluarga politik elit. Namun, anggapan itu tampaknya tidak benar karena Jokowi telah tertular virus dari para elit politik sebelumnya yang terlibat dalam politik dinasti dan nepotisme. Jokowi telah memberikan restu kepada anaknya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjabat sebagai walikota Solo. Dilaporkan bahwa Bobby Nasution, menantu Jokowi, dan putranya juga akan maju sebagai wali kota Medan. Bahkan Siti Nur Azizah, anak dari Wakil Presiden RI dari tahun 2019 hingga 2020, Ma'ruf Amin, mencalonkan diri untuk menjadi Wali Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020.

Ada dua cara di mana dinasti politik di Indonesia dilakukan yaitu secara kebetulan atau dirancang. Kebijakan Dinasti sudah ada sejak lama. Secara hubungan keluarga dalam pemerintahan sangat kuat, sehingga keluarga yang masuk ke dalam pemerintahan atau berpartisipasi dalam kontes politik sudah diatur sedemikian rupa sehingga mereka dapat memastikan bahwa tujuan mereka tercapai.<sup>16</sup> Dalam kasus lain, dinasti politik yang terjadi secara tidak sengaja terjadi ketika keluarga pemimpin tiba-tiba mencalonkan diri untuk mengambil alih pemerintahan demi mempertahankan kekuasaan informal terhadap

---

<sup>16</sup> Khairi, H. *Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. JWP (Jurnal Wacana Politik, 2022), 7(1), 35.



pengganti mereka jika mereka menang dalam perlombaan politik. Dinasti politik ini menyebabkan dominasi kekuasaan oleh keluarga atau keturunan dalam jabatan politik, yang berdampak pada berbagai aspek politik, sosial, dan ekonomi. Untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari fenomena ini, studi teori dampak politik dinasti ini sangat penting.

Ada beberapa konsekuensi politik dinasti yaitu Pertama, kontrol kekuasaan dan otoritarianisme dalam sistem politik yang didominasi oleh keluarga, otoritarianisme cenderung muncul karena kelompok tertentu memiliki kontrol yang kuat. Menurut teori ini, kekuatan keluarga terus-menerus dapat membahayakan demokrasi dan partisipasi masyarakat. Kedua, teori pengaruh politik dan nepotisme menekankan kemungkinan anggota keluarga ditunjuk keposisi penting dalam birokrasi atau pemerintahan, mengabaikan meritokrasi, ini dapat menyebabkan penyalahgunaan otoritas dan ketidaksetaraan distribusi. Ketiga, keluarga politik yang mendominasi cenderung mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada memperhatikan kesenjangan potensi dalam distribusi sumber daya dan peluang. Keempat, gangguan politik yang dapat mengganggu stabilitas dan perkembangan nasional, dapat disebabkan oleh konflik keluarga atau ketidaksepakatan antara kelompok politik yang bersaing. Kelima, perubahan kebijakan yang terbatas yaitu pemimpin dari keluarga politik cenderung mempertahankan kebijakan yang sudah ada atau hanya mengubahnya secara terbatas, yang menyebabkan stagnasi dalam inovasi kebijakan. Keenam, menurunkan kepercayaan publik yaitu jika masyarakat percaya bahwa satu keluarga terus memegang kekuasaan, ini dapat merugikan legitimasi institusi politik dan kepercayaan publik terhadapnya. Ketujuh, teori ini menunjukkan bahwa adanya keluarga politik yang sudah mapan dapat menghalangi individu untuk menjadi pemimpin baru.

### **C. Dinasti Politik dalam Perspektif Siyasah**

Dalam Islam sendiri, dinasti politik bukanlah hal baru; dinasti ini muncul jauh sebelum zaman modern, pada masa pemerintahan nasional oleh para sahabat Nabi.

#### **1. Dinasti politik Bani Umayyah tahun 661 sampai 750 M**

Suatu bentuk pemerintahan dinasti atau dinasti yang cenderung feodal dan turun temurun untuk mempertahankan kekuasaan hilangnya keteladanan Nabi dalam memilih pemimpin yang penuh unsur diplomasi, dibumbui otoritarianisme, kekuasaan absolut, kekerasan, dan

tipu muslihat, terlihat dari bangkitnya kekuasaan dinasti pasca khulafahur rasyidin. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan.

Naiknya Muawiyah ke tampuk kekuasaan juga disebabkan oleh keberhasilan kaum Khawarij (sekelompok pembangkang Ali) dalam membunuh Khalifah Ali, namun kemudian tampuk kekuasaan diserahkan kepada putranya Hasan, namun dengan dukungan yang kuat dan akhirnya tanpa situasi politik yang kacau balau, kepemimpinannya tidak akan bertahan lama. Beberapa bulan akhirnya Hasan menyerahkan kepemimpinan kepada Mu'awiyah, namun dengan pemahaman bahwa pilihan pemimpin masa depan akan diserahkan kepada umat Islam. Perjanjian ini ditanda tangani pada tahun 661 M/41 M, dan meskipun perjanjian ini mempersatukan umat Islam di bawah satu kepemimpinan, namun secara tidak langsung mengubah pola pemerintahan dan menjadi kerajaan, maka dikenallah tahun penyatuan (Am Jama'a). Meski demikian, kemunculan Bani Umayyah menandai babak baru kemajuan peradaban Islam, terbukti dengan kontribusi mereka dalam perluasan wilayah, pendidikan, pemajuan kebudayaan, dan lain-lain. Peralihan kekuasaan Islam dari Hassan ke Mu'awiyah merupakan tonggak resmi lahirnya Dinasti Bani Umayyah di bawah kepemimpinan khalifah pertama, Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Tata cara serah terima dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan terjadi di sebuah tempat bernama Maskin, tempat ditancapkannya sumpah setia. Dengan cara ini, ia berhasil mewujudkan mimpinya menjadi pemimpin umat Islam dan menggantikan Hasan bin Ali sebagai khalifah.

Meski Muawiyah tidak mendapat pengakuan resmi dari penduduk kota Basra, namun Muawiyah tetap melanjutkan upaya tersebut dan akhirnya, secara ilegal, jabatan tertinggi umat Islam dialihkan ke tangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan demikian, berdirilah dinasti baru: Bani Umayyah (661-750 M) Dinasti ini memodifikasi gaya kepemimpinannya dengan meniru gaya kepemimpinan raja-raja Persia dan Romawi serta mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi. Keadaan ini menandai berakhirnya sistem pemerintahan khilafah yang berdasarkan prinsip "demokratis" yang menentukan kepemimpinan umat Islam sesuai pilihannya sendiri. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kotanya dari Madinah ke Damaskus, di mana ia memerintah sebagai mantan gubernur. Namun perlawanan terhadap Bani Umayyah terus berlanjut, dan perlawanan ini dimulai oleh Husein bin Ali, putra kedua Khalifah Ali bin Abi Thalib. Husein menolak setia kepada Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah saat naik takhta pada tahun 680 M, ia hijrah dari Mekah ke Kufah atas permintaan kaum Syi'ah

Irak. Umat Islam di wilayah tersebut tidak mengakui Yazid Mereka mengangkat Husein sebagai khalifah. Dalam pertempuran yang tidak seimbang di Karbala dekat Kufah, pasukan Hussein dikalahkan dan Hussein sendiri terbunuh Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus, dan jenazahnya dimakamkan di Karbala.

Kepemimpinan dan gaya pemerintahan Bani Umayyah (abad ke-41/661 M) berbeda dengan masa sebelumnya, yaitu pada masa pemerintahan Khulafahur Rasyiddin. Pada masa pemerintahan Khulafaul Rasyiddin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis, sedangkan penguasa Bani Umayyah diangkat langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem suksesi turun-temurun monarki, yaitu menjadi gaya kepemimpinan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kekhalifahan Muawiyah dicapai bukan melalui pemilu atau kekuasaan mayoritas, melainkan melalui kekerasan, diplomasi, dan penipuan

Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun bermula dari permintaan Muawiyah agar seluruh warga menyatakan setia kepada putranya, Yazid. Muawiyah ingin meniru monarki Persia dan Byzantium. Dia masih menggunakan istilah "Khalifah" tetapi menafsirkan ulang kata tersebut untuk mengagungkan posisinya. Yang dimaksudnya dengan "penguasa" dalam arti buruk, dimana proses pembentukan pemerintahan Bani Umayyah tidak dilakukan secara demokratis dan pemimpinnya dipilih melalui musyawarah yang disebut Khalifah. Ia mengambil alih kekuasaan dari tangan Hasan bin Ali (41 H/661 M). Akibatnya terjadi beberapa perubahan prinsip dan berkembanglah gaya-gaya baru yang sangat mempengaruhi kekuatan dan perkembangan ummat Islam. Pemilihan khalifah didasarkan pada penunjukan langsung oleh khalifah sebelumnya, antara lain melalui pengangkatan putra mahkota menjadi khalifah berikutnya.

Orang pertama yang mengangkat putra mahkota adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang mengangkat Yazid bin Muawiyah. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa (661-681 M), penguasa Bani Umayyah menunjuk penggantinya di kemudian hari. Hal ini terjadi karena Muawiyah sendiri memajukan proses dan institusi kerajaan dengan mengangkat Yazid sebagai Putra Mahkota menggantikannya di masa depan Penunjukan ini dilakukan Mu'awiyah atas nasehat al-Muhir bin Sukan agar terhindar dari instabilitas politik dan konflik antar-Muslim yang terjadi di Tanah Air sebelumnya. Sejak itu, sistem pemerintahan Bani Umayyah telah meninggalkan tradisi musyawarah dalam memilih pemimpin Islam. Untuk mendapatkan penegasan, penguasa Bani Umayyah memerintahkan para pemuka agama untuk

mengucapkan sumpah setia (bayat) di hadapan khalifah. Padahal, sistem pengangkatan penguasa ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi dan ajaran musyawarah Islam yang dianut Khulafaur rasyidin. Selain perubahan sistem pemerintahan, terjadi perubahan lain pada masa Bani Umayyah, seperti terbitnya Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Kulafaul Rasyiddin, Baitul Mal menjadi kekayaan umat, karena semua warga negara mempunyai hak yang sama atas harta benda. Namun setelah masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Baitul Mal berubah status dan menjadi milik kerajaan seluruh penguasa Bani Umayyah kecuali Umar bin Abdul Aziz (717-729 M).

Berikut ini nama-nama khalifah yang telah memerintah pada masa Daulah Umayyah dengan pusat di Damaskus:

1. Muawiyah ibn Abi Sufyan (661-681 M)
2. Yazid ibn Muawiyah (681-683 M)
3. Muawiyah ibn Yazid (683-684 M)
4. Marwan ibn Al-Hakam (684-685 M)
5. Abdul Malik ibn Marwan (685-705 M)
6. Al-Walid ibn Abdul Malik (705-715 M)
7. Sulaiman ibn Abdul Malik (715-717 M)
8. Umar ibn Abdul Aziz (717-720 M)
9. Yazid ibn Abdul Malik (720-724 M)
10. Hisyan ibn Abdul Malik (724-743 M)
11. Walid ibn Yazid (743-744 M)
12. Yazid ibn Walid (Yazid II) (744 M)
13. Ibrahim ibn Malik (744 M)
14. Marwan ibn Muhammad (745-750M).

#### **D. Dinasti di Indonesia Perspektif Politif Islam Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah dan Kepemimpinan**

Di dalam Islam tidak terdapat aturan yang baku, jelas dan siap pakai mengenai politik ataupun bernegara. Namun terdapat beberapa pandangan pemikir muslim mengenai politik, salah satunya yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri merumuskan konsep nalar politik Arab dalam bukunya al-'Aql al-Siyasi al-'Arabi: Muhaddidatuh wa Tajalliyatu. Buku ini merupakan kelanjutan dari dua buku sebelumnya (Takwin al-Aql al-Arabi dan Binyah al-Aql al-Arabi).<sup>17</sup>

Dalam buku 'Aql al-Siyasi al-'Arabi menjelaskan berupa gambaran ranah nalar praktis dari kedua buku sebelumnya, yang mana masih

---

<sup>17</sup> Annisaul Maslamah, "Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasi Kontemporer". (Jurnal Syariah & Hukum, 2022)

bersifat teoritis dan epistemologis dalam menjelaskan kritik nalar Arab (Abbas Arfan, 2010). Konsep nalar politik Al-Jabiri terdiri dari tiga motif, yang mengacu pada rumusan konsep Ibnu Khaldun, yang kemudian direkonstruksi dengan istilah yang berbeda (Wahid, 2018), yaitu: Dakwah keagamaan (al-da'wah al-diniyyah), diubah menjadi akidah (al-'aqidah). Solidaritas kesukuan (al-'ashabiyyah al-qabiliyyah) disederhanakan menjadi kabilah (suku). Sistem ekonomi, dia menggunakan kata ghanimah untuk menyebutnya. Istilah-istilah yang pernah digunakan oleh tokoh sebelumnya direvitalisasi kembali oleh Abid Al-Jabiri agar lebih familiar dan menyesuaikan dengan studi keislaman dikalangan masyarakat (Wahid, 2018).

Dari sudut pandang politik Islam, isu politik dinasti Indonesia 2023–2024 memunculkan pertanyaan penting tentang syariah, keadilan sosial, keterlibatan Muslim, dan pengelolaan kekuasaan yang sejalan dengan cita-cita Islam. Mengingat hal ini, kita dapat mengkaji sejumlah aspek penting yang muncul dari sudut pandang politik Islam tentang politik dinasti Indonesia (Gunanto, 2020). Menurut teori politik Islam, prinsip-prinsip syariah—seperti keadilan, akuntabilitas, dan terwujudnya kebaikan bersama—harus menjadi landasan bagi kepemimpinan. Topik tentang seberapa banyak pemimpin dinasti memasukkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan dan tindakan mereka diangkat oleh masalah politik dinasti. Masalah politik dinasti Indonesia rumit dan sulit dari sudut pandang politik Islam, menimbulkan pertanyaan penting mengenai penerapan prinsip-prinsip Islam dalam administrasi politik. Kesimpulan isu ini memerlukan pertimbangan cermat tentang bagaimana hal itu memengaruhi prinsip-prinsip syariah, keadilan sosial, keterlibatan politik Muslim, dan tata kelola kekuasaan berbasis agama.

Dalam perspektif politik Islam, kepemimpinan seharusnya didasarkan pada etika dan moral Islam, memastikan keadilan, akuntabilitas, dan pelayanan masyarakat yang sejalan dengan ajaran agama. Kesimpulan ini memunculkan kebutuhan untuk menilai apakah pemimpin dinasti mampu memadukan nilai-nilai syariah dengan praksis politik mereka (Tanjung & Faizal, 2021). Dalam konteks ini, pandangan politik Islam menekankan demokrasi yang inklusif dan partisipasi aktif umat Islam. Isu politik dinasti dapat merintangangi partisipasi politik umat Islam, baik dalam konteks partai politik maupun dalam proses pembentukan kebijakan. Kesimpulan ini membawa implikasi penting tentang perlunya mekanisme politik yang memastikan keadilan dan

kesetaraan akses terhadap kekuasaan, sehingga partisipasi politik umat Islam dapat dihargai dan diakui.<sup>18</sup>

Politik dinasti berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa baik struktur politik ini dapat menyeimbangkan keuntungan sosial dan ekonomi. Diskusi mengenai dampak politik dinasti terhadap kesejahteraan masyarakat dan potensi ketimpangan dipicu oleh hasil ini. Dari sudut pandang politik Islam, akuntabilitas dan keterbukaan menjadi pertimbangan penting saat membahas masalah politik dinasti. Pedoman ini dianggap penting untuk menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa keputusan politik konsisten dengan keyakinan Islam.

Untuk menentukan sejauh mana kebijakan dan tindakan politik dinasti konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, kesimpulan tentang topik ini menimbulkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pemerintahan politik. Beberapa gagasan mendasar dapat ditemukan dalam perspektif Islam tentang politik dinasti, meskipun faktanya tidak ada satu pun sudut pandang yang diterima oleh semua Muslim.

a.) Kepemimpinan Berdasarkan Kualifikasi Pemikiran Islam menekankan bahwa kepemimpinan seharusnya didasarkan pada kualifikasi, keadilan, dan kemampuan, bukan sekadar hubungan keluarga atau dinasti. Prinsip ini dalam ajaran Islam yang menekankan memilih pemimpin yang adil dan mampu memimpin dengan baik, tidak memandang garis keturunan.

b.) Syariah dan Keadilan Sosial Islam memberikan penekanan pada penerapan syariah sebagai panduan untuk tata kelola politik. Isu politik dinasti di Indonesia menciptakan kompleksitas dalam dinamika politik, terutama ketika dilihat dari perspektif politik Islam. Dalam pembahasan ini, dilihat bagaimana politik dinasti di Indonesia memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis dalam kerangka politik Islam, mencakup dampaknya terhadap demokrasi, prinsip-prinsip syariah, dan partisipasi politik umat Islam (Maslamah & Yusdani, 2022).

Di Indonesia, politik dinasti memiliki sejarah panjang dan tampaknya telah berkembang selama sejumlah periode waktu, termasuk Orde Baru dan era kolonial. Dalam politik Indonesia, sejumlah keluarga politik terus memegang pengaruh dan pengaruh. Tren ini menimbulkan kekhawatiran mengenai akuntabilitas, transparansi, dan representasi yang adil dengan membangun tatanan politik yang diwariskan dari satu

---

<sup>18</sup> Ilham Budiman, *Perpektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Tahun 2023-2024)*, (Kamy: Jurnal Ilmu Agama, 2024), 7(2).

generasi ke generasi berikutnya (Dairani, 2022). Menurut teori politik Islam, demokrasi harus menjunjung tinggi konsep keberlanjutan syariah, keterlibatan Muslim, dan keadilan.

Meskipun demikian, subjek politik dinasti dapat menimbulkan keraguan tentang seberapa baik demokrasi Indonesia mencapai tujuan-tujuan ini. Politik dinasti sering dikritik karena menghasilkan akses yang tidak setara terhadap kekuasaan politik, yang dapat menjadi kontraproduktif terhadap cita-cita demokrasi yang inklusif dan adil. Hukum syariah seharusnya menjadi landasan pemerintahan politik dari sudut pandang politik Islam. Sejauh mana praktik politik dinasti selaras dengan norma-norma syariah masih menjadi bahan perdebatan. Syariah menempatkan penekanan kuat pada akuntabilitas, keadilan, dan pemberantasan korupsi. Akibatnya, politik dinasti yang diwariskan perlu memastikan bahwa kebijakan dan praktik mereka selaras dengan nilai-nilai Islam.

Ajaran Islam menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam kepemimpinan. Politik dinasti sering dikritik karena dapat menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas lemah dan kebijakan politik lebih terfokus pada kepentingan keluarga politik daripada kepentingan umum. Dalam perspektif politik Islam, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Politik dinasti di Indonesia sering kali menciptakan dilema antara mempertahankan tradisi dan mendorong reformasi. Sementara beberapa keluarga politik memiliki dukungan kuat dari masyarakat karena dianggap sebagai penjaga tradisi atau kestabilan, ada juga tuntutan untuk reformasi politik yang lebih demokratis dan inklusif.

Opini politik Islam tentang politik dinasti dibentuk secara signifikan oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Mereka dapat membantu umat Islam dengan menawarkan nasihat moral dan etika serta dengan menyuarakan keprihatinan tentang tindakan politik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jika ditelaah dari sudut pandang politik Islam, politik dinasti Indonesia menimbulkan sejumlah isu yang memerlukan pertimbangan cermat dan tindakan proaktif. Untuk mencapai tata kelola politik yang lebih adil, terbuka, dan partisipatif, kesimpulan ini menyerukan reformasi dan transformasi politik yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

## Kesimpulan

Politik dinasti yang ada di Indonesia sudah dipandang sebagai penyakit karena sudah merusak makna suci dari demokrasi yang

mengandung arti kebebasan dalam melakukan hal terutama di dalam hal pencalonan dan kontestasi politik. Dasarnya hal yang menjadi permasalahan di dalam politik ini adalah tidak adanya dibangun berlandaskan kompetensi dan kemampuan. Karena hal tersebut pemimpin yang dilahirkan ialah pemimpin yang tidak memiliki kualitas dan kemampuan dalam bidangnya ditekuni, nyatanya yang saat ini terjadi di Indonesia memperlihatkan bahwa praktik politik dinasti harus berdasarkan pada asas kekerabatan, bukan berdasarkan atas kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh seorang calon. Sehingga karena hal tersebutlah dapat dikatakan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan di Indonesia dalam jangka waktu yang menengah dan jangka Panjang.

Dinasti politik dalam perspektif fiqh siyasah sebenarnya tidaklah menjadi persoalan jika memang calon yang diajukan memiliki kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin dan saat pemilihan berlangsung dengan adil dan jujur. Karena memang persoalan pemilihan pemimpin tidaklah secara jelas dan gamblang dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. itu berarti persoalan ini adalah persoalan ijtihadi bagi umat Islam. Yang menjadi persoalan dan melanggar prinsip syariah adalah jika memaksakan calon yang tidak layak hanya karena faktor memiliki kekerabatan dari pemimpin petahana dan pemilihannya berlangsung curang dan tidak adil.



## Daftar Pustaka

- Annisaul Maslamah, *"Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Tinjauan Fikih Siyasi Kontemporer"*. (Jurnal Syariah & Hukum, 2022)
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3<sup>rd</sup> ed.). University of Chicago Press
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4<sup>th</sup> ed.). Sage Publications.
- Djoni Gunanto, *"Tinjauan Kritis Politik dalam Perspektif Demokrasi"*, SAWALA Jurnal Administrasi Negara 8, No 2, 2020.
- Effendi, W.R, 2018, *Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti*. (Kota Banten: Jurnal Trias Politika)
- Hart, C. 2001. *Doing a literature review: Releasing the social science research imagination*. (Sage Publications).
- Hidayati, Nur. "DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA." *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (1 Maret 2014). <https://doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357>.
- Huda, N, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press)
- Ilham Budiman, *Perpektif Islam Tentang Dinasti Politik (Studi Kasus Isu Dinasti Tahun 2023-2024)*, (Kamyas: Jurnal Ilmu Agama, 2024), 7(2).
- Khairi, H. 2022. *Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia*. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 35.
- Lestari, M, 2020, *Dinasti dalam Perspektif Demokrasi*, *Artikel Ilmiah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati)
- Manan, Bagir, Harijanti, D, S, 2014, *Memahami Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Mega Lestari, *"Dinasti dalam Perspektif Demokrasi"*, *Artikel Ilmiah* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020). H. 5
- Querubin, P, *Family and Politics: Dynasty Incubency Advantage*, (Philippines: Unpublished Manuscript, 2010).
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (30 Oktober 2017): 111–19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>.
- Titin Purwaningsih, *"Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan"*, *Jurnal Politik* Volume 1, No Edisi 1, hlm.98
- Yusdani, *Politik Dinasti dalam Persoektif Islam dan Negara*. 27 Agustus 2020, diakses pada 12 Desember 2024.